

Transparansi Administrasi Pertanahan Perlu Dibangun

Wednesday, 21 Juli 2010 WIB, Oleh: HumasUGM



YOGYAKARTA-Sebanyak 23 expert (ahli) di bidang pertanahan dunia dari berbagai negara sejak tanggal 19-22 Juli 2010 berkumpul di kampus UGM. Para ahli pertanahan tersebut antara lain berasal dari Srilanka, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Filipina, Nepal, Laos, Kamboja, Vietnam, Belanda, UN-HABITAT (United Nations Human Settlements Program) , International Federation of Surveyor (FIG) dan Indonesia.

Menurut Ketua Jurusan Teknik Geodesi UGM Ir. Subaryono, MA, Ph.D didampingi panitia local Dr.Trias Aditya, S.T.,M.Sc., expert group meeting (EGM) di bidang pertanahan tersebut banyak membahas mengenai persoalan administrasi dan transparansi pertanahan khususnya di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika.

“Persoalan pertanahan itu mulai dari proses pendaftaran, pengelolaan hingga pembangunan pertanahan,” ujar Subaryono di sela-sela acara di UC UGM, Selasa (20/7).

Dijelaskan Subaryono, problem krusial yang rata-rata banyak dihadapi di berbagai dunia saat ini yaitu peruntukan pertanahan yang tidak pro rakyat miskin (no pro poor). Akibat dari peruntukan pertanahan yang tidak pro rakyat miskin ini mengakibatkan masih dijumpainya kasus sengketa tanah, perebutan lahan hingga korupsi penyelenggaraan pertanahan.

“Di Indonesia masih dijumpai seperti kasus sengketa tanah, perebutan lahan, hingga korupsi penyelenggaraan pertanahan,” katanya.

Dengan masih dijumpainya kasus administrasi dan transparansi pertanahan yang belum tertata baik ini maka diperlukan adanya pembangunan kapasitas (capacity building) di Asia sehingga kebijakan pertanahan yang tidak pro rakyat miskin lambat laun bisa tereduksi.

“Maka perlu peningkatan kapasitas untuk menata kebijakan pertanahan tersebut,” imbuh Subaryono.

Sementara Dr. Trias juga menambahkan bahwa dengan digelarnya acara EGM ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan training para praktisi pertanahan di tingkat ASEAN. Acara ini juga melibatkan beberapa perguruan tinggi dunia seperti Hanoi University of Science Vietnam, Kathmandu University, University of Twente, UN-HABITAT, serta United Nations University, School of Land Administration Studies.

“Setelah pertemuan para ahli ini akan ditindaklanjuti dengan training para praktisi,” kata

Trias.

Sebelumnya, Ir Tony Atyanto Dharoko MPhil PhD sebagai Wakil Rektor Bidang Alumni dan Pengembangan Usaha yang membuka EGM mengatakan bahwa UGM menyambut baik kegiatan ini. Apalagi mengingat problem pertanahan merupakan isu krusial dan melibatkan multi disiplin ilmu.

“œ UGM memberikan apresiasi dan menyambut baik kegiatan untuk peningkatan kapasitas pertanahan ini,” kata Tony (Humas UGM/Satria)

Berita Terkait

- [Dissinkronisasi Otonomi Daerah Dengan Hukum Pertanahan](#)
- [Hukum Pertanahan Berkembang Lebih Baik](#)
- [Dosen FT UGM Kaji Model Asesmen Interoperabilitas Data Geospasial IIP](#)
- [Tanah Terlantar Capai 7,3 Juta Hektar](#)
- [Pakar UGM: Reformasi Birokrasi SBY Telah Gagal Sebelum Lahir](#)